

**PENDAMPINGAN TATA KELOLA SDM DAN PERPAJAKAN UNTUK
MEWUJUDKAN USAHA YANG BERKELANJUTAN PADA BUMDES MAKMUR
DESA TAMAN SARI**

**Eka Ningsih, Hilmi Fauji, Dharnita Chandra, Thawap Nasution, Dwi Agung Saputra,
Eko Budi Prasetyo, Partiwi**

Institut Maritim Prasetya Mandiri

Email : dharnitachan65@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tata kelola sumber daya manusia (SDM) dan kepatuhan perpajakan pada BUMDes Makmur Desa Taman Sari sebagai upaya mewujudkan usaha yang berkelanjutan. Permasalahan utama yang dihadapi mitra meliputi lemahnya manajemen SDM, belum tersusunnya struktur organisasi dan standar operasional prosedur (SOP), rendahnya literasi perpajakan, serta pencatatan keuangan yang masih sederhana dan manual. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan pendampingan partisipatif yang meliputi sosialisasi, pelatihan manajemen dasar, bimbingan teknis perpajakan, serta pendampingan penyusunan SOP dan pencatatan keuangan sederhana. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pengurus BUMDes terhadap pembagian tugas, pengelolaan administrasi usaha, serta kewajiban perpajakan, termasuk kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak sebagai bagian dari keberlanjutan usaha desa. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola kelembagaan BUMDes Makmur sehingga lebih profesional, transparan, dan berdaya saing dalam mendukung perekonomian desa secara berkelanjutan.

Kata kunci: pendampingan, perpajakan, usaha berkelanjutan, tata kelola SDM

1. PENDAHULUAN

BUMDes Makmur Desa Taman Sari memiliki potensi usaha yang cukup besar dalam bidang pembesaran ikan, namun menghadapi kendala pada tata kelola SDM dan kepatuhan perpajakan. Kurangnya keterampilan manajerial dan literasi perpajakan menyebabkan rendahnya efektivitas pengelolaan usaha pembesaran ikan serta risiko administrasi perpajakan.

BUMDes Makmur Desa Taman Sari memiliki potensi usaha yang cukup besar karena didukung oleh ketersediaan sumber daya lokal dan kebutuhan masyarakat terhadap produk ikan serta jasa yang dihasilkan. Namun, potensi tersebut belum diimbangi dengan pengelolaan yang optimal, terutama dalam hal tata kelola sumber daya manusia (SDM) dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Kondisi ini berpotensi menghambat perkembangan usaha BUMDes dalam jangka panjang. Selain itu, BUMDes Makmur Desa Taman Sari juga telah mengembangkan usaha Budidaya Perikanan sebagai salah satu unit usaha unggulan.

Kegiatan Budidaya Perikanan ini memanfaatkan potensi sumber daya perairan desa, dengan tujuan meningkatkan ketahanan pangan, menyediakan lapangan kerja, serta memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Namun, pengelolaan budidaya perikanan tersebut masih menghadapi kendala dalam hal penerapan teknologi, manajemen produksi, dan strategi pemasaran yang berkelanjutan sehingga membutuhkan pendampingan yang lebih intensif.

Permasalahan utama yang dihadapi mitra terletak pada keterbatasan kemampuan manajerial pengurus BUMDes yang berfokus dalam pembesaran ikan. Sebagian besar pengelola

belum memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman yang memadai dalam bidang manajemen usaha. Hal ini berdampak pada lemahnya perencanaan bisnis, kurangnya pencatatan keuangan yang sistematis, serta belum adanya standar operasional prosedur yang jelas. Akibatnya, efektivitas dan efisiensi pengelolaan usaha menjadi rendah.

Selain itu, tingkat literasi perpajakan pengurus BUMDes juga masih rendah. Banyak pengelola yang belum memahami kewajiban perpajakan, tata cara pelaporan, maupun konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat kelalaian administrasi pajak. Kondisi ini menimbulkan risiko denda dan sanksi administratif yang dapat merugikan keberlangsungan usaha BUMDes. Kurangnya pendampingan dan sosialisasi dari pihak terkait memperparah situasi tersebut.

Dari sisi kelembagaan, BUMDes Makmur masih menghadapi kendala dalam membangun sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel. Dokumentasi kegiatan usaha sering kali tidak terdokumentasi dengan baik sehingga menyulitkan proses evaluasi dan pengambilan keputusan. Keterbatasan kapasitas SDM menyebabkan fungsi pengawasan internal dan pelaporan keuangan belum berjalan sebagaimana mestinya. Apabila permasalahan ini tidak segera ditangani, maka keberlanjutan usaha BUMDes akan sulit dicapai. Potensi usaha yang dimiliki bisa terhambat oleh risiko administrasi dan ketidakpatuhan pajak. Oleh karena itu, diperlukan adanya program pendampingan yang fokus pada peningkatan kapasitas SDM, penguatan tata kelola, serta literasi perpajakan agar BUMDes Makmur mampu tumbuh sebagai lembaga usaha desa yang sehat, mandiri, dan berkelanjutan.

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam tata kelola usaha, memberikan pendampingan perpajakan, serta mendorong keberlanjutan usaha BUMDes pembesaran ikan melalui penguatan sistem administrasi dan manajemen. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) BUMDes Makmur Desa Taman Sari dalam aspek tata kelola usaha dan kepatuhan perpajakan. Dengan adanya peningkatan kapasitas ini, diharapkan para pengelola BUMDes memiliki kemampuan manajerial yang lebih baik, sehingga dapat menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi usaha secara lebih sistematis dan profesional. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan teknis terkait perpajakan. Melalui pendampingan tersebut, 2 pengurus BUMDes akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kewajiban perpajakan, tata cara pelaporan, serta mekanisme administrasi pajak yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan demikian, risiko terjadinya kesalahan administrasi maupun sanksi akibat kelalaian dapat diminimalkan. Tujuan berikutnya adalah membangun kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak sebagai bagian dari keberlanjutan usaha desa. Pajak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai kontribusi nyata BUMDes terhadap pembangunan desa dan negara. Kesadaran ini diharapkan dapat menumbuhkan budaya organisasi yang transparan, akuntabel, dan patuh hukum di lingkungan BUMDes.

Kegiatan ini juga ditujukan untuk memperkuat sistem administrasi dan manajemen di BUMDes Makmur. Dengan adanya sistem pencatatan yang rapi, laporan keuangan yang akuntabel, dan prosedur operasional yang jelas, BUMDes akan memiliki fondasi kelembagaan yang kuat. Hal ini penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta membuka peluang kerja sama dengan pihak eksternal. Secara keseluruhan, tujuan kegiatan ini adalah mendorong keberlanjutan usaha BUMDes Makmur melalui peningkatan kapasitas SDM, kepatuhan perpajakan, dan penguatan kelembagaan. Dengan demikian, BUMDes tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga dapat berkembang sebagai motor penggerak ekonomi desa yang mandiri, sehat, dan berdaya saing tinggi.

2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan PkM ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi pendampingan langsung (direct mentoring) kepada pengurus BUMDes Makmur Desa Taman Sari. Tahapan kegiatan meliputi:

1. Identifikasi Masalah: Melalui observasi lapangan dan diskusi dengan pengurus BUMDes untuk memetakan permasalahan terkait SDM dan perpajakan.
2. Perencanaan Intervensi: Menyusun materi edukasi dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan mitra, termasuk SOP tata kelola SDM dan panduan dasar perpajakan.
3. Pelaksanaan Kegiatan:
 - Sosialisasi tentang pentingnya tata kelola SDM dan kepatuhan perpajakan.
 - Pelatihan manajemen dasar: penyusunan struktur organisasi, pembagian tugas, dan SOP operasional.
 - Pendampingan teknis perpajakan: pendaftaran NPWP, aktivasi akun DJP Online, dan simulasi pelaporan pajak.
 - Pelatihan pencatatan keuangan sederhana berbasis aplikasi digital.
4. Evaluasi dan Refleksi: Mengumpulkan umpan balik dari peserta melalui sesi tanya jawab dan formulir evaluasi untuk menilai efektivitas kegiatan.
5. Dokumentasi dan Diseminasi: Menyusun laporan akhir dan artikel ilmiah sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penyebaran hasil kegiatan.

Kegiatan dilaksanakan selama 4 bulan, mulai September hingga Desember 2025, di Dusun Taman Sari 01, Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola SDM

Setelah pendampingan, pengurus BUMDes menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman manajemen dasar. Mereka mulai menyusun struktur organisasi yang jelas, mendefinisikan pembagian tugas, dan membuat draft Standard Operating Procedure (SOP) untuk kegiatan operasional harian. Hal ini menjadi fondasi penting bagi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan usaha.

2. Peningkatan Literasi dan Kepatuhan Perpajakan

Sebelum pendampingan, BUMDes belum memiliki NPWP dan tidak pernah melakukan pelaporan pajak. Setelah kegiatan, pengurus telah:

- Memahami jenis-jenis pajak yang relevan (PPH Final Pasal 4 ayat (2), PPN, dll.).
- Mendaftarkan NPWP atas nama BUMDes.
- Mengaktifkan akun DJP Online.
- Memahami jadwal dan mekanisme pelaporan SPT.

Kesadaran bahwa kepatuhan pajak merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan legalitas usaha juga meningkat.

3. Perbaikan Sistem Administrasi Keuangan

Pengenalan aplikasi pencatatan keuangan sederhana membantu pengurus beralih dari sistem manual ke sistem semi-digital. Meski masih dalam tahap awal, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi pencatatan arus kas dan mempermudah penyusunan laporan keuangan.

4. Tantangan dan Rekomendasi Lanjutan

Beberapa tantangan tetap ada, seperti keterbatasan waktu pelatihan dan keberlanjutan implementasi SOP. Oleh karena itu, direkomendasikan adanya pendampingan

lanjutan secara berkala, kolaborasi dengan Kantor Pelayanan Pajak setempat, serta integrasi program ini dengan kurikulum kampus melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN).

4. KESIMPULAN

Kegiatan PkM ini berhasil meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes Makmur dalam tata kelola SDM dan kepatuhan perpajakan. Pendampingan partisipatif terbukti efektif dalam membangun kesadaran akan pentingnya manajemen profesional dan kepatuhan hukum sebagai pilar usaha berkelanjutan. Hasil kegiatan tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi BUMDes, tetapi juga menjadi model intervensi yang dapat direplikasi di desa lain dengan kondisi serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Panduan Perpajakan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi 2018. Yogyakarta: Andi.
- Noor, E. (2012). Agribisnis Perikanan. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Subekti, I. (2020). Manajemen SDM di Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes). Yogyakarta: Deepublish.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan BUMDes.